

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan. Aceh banyak menghasilkan lada dan tambang serta hasil hutan. Oleh karena itu, Belanda berambisi untuk mendudukinya. Sebaliknya, orang-orang Aceh tetap ingin mempertahankan kedaulatannya. Sampai dengan tahun 1871, Aceh masih mempunyai kebebasan sebagai kerajaan yang merdeka. Aceh sebagai suatu Negara yang berdaulat penuh di pintu gerbang masuk selat malaka, sebenarnya juga turut memikul tanggung jawab pengamanan, meskipun hal itu sukar dipenuhi, mengingat persenjataannya yang masih lemah dibandingkan dengan bangsa-bangsa Barat yang sedang terlibat kompetisi antara mereka sendiri. Tetapi sebagai pintu gerbang masuk, semakin kelihatan pula pentingnya kedudukan Aceh di bidang politik, ekonomi dan militer bagi bangsa barat.

Dapat dikatakan titik tolak keretakan itu mulai terlihat sejak ditanda tangannya Traktat Pidie (1819 M) antara Aceh dengan Inggris. Perjanjian kerjasama dibidang politik dan ekonomi (terdiri dari 9 pasal) antara kedua Negara itu diamati oleh Belanda dengan penuh curiga. Menurut penilaian Belanda melalui perjanjian tersebut tidak mustahil pada gilirannya nanti Aceh akan menjadi milik Inggris. Namun untuk secara langsung melibatkan diri dalam masalah-masalah Aceh tidak dimungkinkan pada waktu itu, mengingat pasal 6 Traktat Pidie yang menegaskan, bahwa Sultan Aceh tidak mengizinkan warga Negara Eropa lainnya tinggal di Aceh tidak akan mengadakan dengan Negara-negara eropa tanpa sepengatuhuan pemerintah Inggris.

Kesempatan baik bagi pemerintahan Hindia Belanda untuk ikut campur tangan dalam masalah-masalah Aceh dalam rangka politik Pax Neerlandica di Nusantara ini diperoleh lima tahun kemudian, yaitu setelah penandatanganan Traktat London (1824 M), antara pemerintah Belanda dengan Inggris. Isi perjanjian tersebut yang terdiri dari 17 pasal, pada dasarnya adalah mengenai pembangian jajahan di wilayah Indonesia dan Semenanjung Melayu antara kedua Negara tersebut. Dengan ditandatanganinya Traktat London telah menyebabkan Aceh terisolir dari percaturan politik “Tiga Segi”: Aceh, Belanda dan Inggris terutama dibidang politik dan ekonomi. Penjaminan kemerdekaan Aceh melalui nota mereka, sebagaimana tampak dari tindakan-tindakan mereka selama abad 19 sepertinya lebih bersifat politis, sementara menunggu kesempatan untuk pada suatu waktu Aceh akan dipertaruhkan antara kedua Negara kolonial itu.

Situasi ini mulai berubah dengan adanya Traktrat Sumatra yang ditandatangani Inggris dengan Belanda pada tanggal 2 November 1871. Isi dari Traktrat Sumatra 1871 itu adalah pemberian kebebasan bagi Belanda untuk memperluas daerah kekuasaan di Sumatra, termasuk Aceh. Dengan demikian, Traktrat Sumatra 1871 jelas merupakan ancaman bagi Aceh. Karena itu Aceh berusaha untuk memperkuat diri, yakni mengadakan hubungan dengan Turki, Konsul Italia, bahkan dengan Konsul Amerika Serikat di Singapura. Tindakan Aceh ini sangat mengkhawatirkan pihak Belanda karena Belanda tidak ingin adanya campur tangan dari luar. Belanda memberikan ultimatum, namun Aceh tidak menghiraukannya. Selanjutnya, pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda memaklumkan perang kepada Aceh. Sebelum terjadi peperangan, Aceh telah

melakukan persiapan-persiapan. Sekitar 3.000 orang dipersiapkan di sepanjang pantai dan sekitar 4.000 orang pasukan disiapkan di lingkungan istana. Pada tanggal 5 April 1873, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler melakukan penyerangan terhadap Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Pada tanggal 14 April 1873, Masjid Raya Aceh dapat diduduki oleh pihak Belanda dengan disertai pengorbanan besar, yakni tewasnya Mayor Jenderal Kohler.

Setelah Masjid Raya Aceh berhasil dikuasai oleh pihak Belanda, maka kekuatan pasukan Aceh dipusatkan untuk mempertahankan Istana Sultan Mahmud Syah. Dengan dikuasainya Masjid Raya Aceh oleh pihak Belanda, banyak mengundang para tokoh dan rakyat untuk bergabung berjuang melawan Belanda. Tampilah tokoh-tokoh seperti Panglima Polim, Teuku Imam Lueng Bata, Cut Banta, Teungku Cik Di Tiro, Teuku Umar dan isterinya Cut Nyak Dien. Serdadu Belanda kemudian bergerak untuk menyerang istana kesultanan, dan terjadilah pertempuran di istana kesultanan. Dengan kekuatan yang besar dan semangat jihad, para pejuang Aceh mampu bertahan, sehingga Belanda gagal untuk menduduki istana.

Pada akhir tahun 1873, Belanda mengirimkan ekspedisi militernya lagi secara besar-besaran di bawah pimpinan Letnan Jenderal J. Van Swieten dengan kekuatan 8.000 orang tentara. Pertempuran seru berkobar lagi pada awal tahun 1874 yang akhirnya Belanda berhasil menduduki istana kesultanan. Sultan beserta para tokoh pejuang yang lain meninggalkan istana dan terus melakukan perlawanan di luar kota. Pada tanggal 28 Januari 1874, Sultan Mahmud Syah meninggal, kemudian digantikan oleh putranya yakni Muhammad Daud Syah.

Sementara itu, ketika utusan Aceh yang dikirim ke Turki, yaitu Habib Abdurrachman tiba kembali di Aceh tahun 1879 maka kegiatan penyerangan ke pos-pos Belanda diperhebat. Habib Adurrachman bersama Teuku Cik Di Tiro dan Imam Lueng Bata mengatur taktik penyerangan guna mengacaukan dan memperlemah pos-pos Belanda. Menyadari betapa sulitnya mematahkan perlawanan rakyat Aceh, pihak Belanda berusaha mengetahui rahasia kekuatan Aceh, terutama yang menyangkut kehidupan sosial-budayanya. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengirim Dr. Snouck Hurgronje (seorang ahli tentang Islam) untuk meneliti soal sosial budaya masyarakat Aceh. Dengan menyamar sebagai seorang ulama dengan nama Abdul Gafar, ia berhasil masuk Aceh.

Dengan demikian langkah yang ditempuh oleh Belanda ialah melakukan politik "de vide et impera" (memecah belah dan menguasai). Cara yang ditempuh kaum ulama yang melawan harus dihadapi dengan kekerasan senjata; kaum bangsawan dan keluarganya diberi kesempatan untuk masuk korps pamong praja di lingkungan pemerintahan kolonial. Belanda mulai memikat hati para bangsawan Aceh untuk memihak kepada Belanda. Pada bulan Agustus 1893, Teuku Umar menyatakan tunduk kepada pemerintah Belanda dan kemudian diangkat menjadi panglima militer Belanda. Teuku Umar memimpin 250 orang pasukan dengan persenjataan lengkap, namun kemudian bersekutu dengan Panglima Polim menghantam Belanda.

Tentara Belanda di bawah pimpinan J.B. Van Heutz berhasil memukul perlawanan Teuku Umar dan Panglima Polim. Teuku Umar menyingkir ke Aceh Barat dan Panglima Polim menyingkir ke Aceh Timur. Dalam pertempuran di

Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur. Sementara itu, Panglima Polim dan Sultan Muhammad Daud Syah, masih melakukan perlawanan di Aceh Timur. Belanda berusaha melakukan penangkapan. Pada tanggal 6 September 1903 Panglima Polim beserta 150 orang parjuritnya menyerah setelah Belanda melakukan penangkapan terhadap keluarganya. Hal yang sama juga dilakukan terhadap Sultan Muhammad Daud Syah. Pada tahun 1904, Sultan Aceh dipaksa untuk menandatangani Plakat Pendek yang isinya sebagai berikut.

1. Aceh mengakui kedaulatan Belanda atas daerahnya.
2. Aceh tidak diperbolehkan berhubungan dengan bangsa lain selain dengan belanda.
3. Aceh menaati perintah dan peraturan Belanda.

Dengan ini, berarti sejak 1904 Aceh telah berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Namun dalam kenyataannya perlawanan terhadap kolonial Belanda masih terus berlanjut. Karena pasukan Marsose juga tetap melakukan patroli untuk mengejar para pejuang Aceh yang belum menyerah. Banyak pula sejarawan, termasuk penulis sendiri yang berminat dan menarik untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam lagi, mengapa perang Belanda di Aceh begitu heroik dan dapat berlangsung relatif lama bila di bandingkan dengan perang-perang lain yang pernah dilakukan Belanda di Nusantara. Mengingat begitu luasnya invasi yang dilakukan oleh kolonialis Belanda terhadap masyarakat Aceh umumnya, serta kurangnya para ahli sejarah dan masyarakat Aceh yang membahas secara khusus mengenai Perang di Aceh Besar ini maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERJUANGAN MASYARAKAT ACEH BESAR**

MENENTANG KOLONIALISME BELANDA (1873- 1912). Agar dapat dikaji lebih dalam lagi berdasarkan fakta dan data yang ada.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Strategi Belanda untuk menguasai Aceh Besar
2. Motivasi Belanda ingin menguasai Aceh Besar
3. Perjuangan masyarakat Aceh Besar menentang Kolonialisme Belanda (1873-1912)

C. PEMBatasan MASALAH

Untuk lebih memaksimal hasil penelitian ini, maka penulis membatasi masalah penelitian dan hanya membahas yaitu: Perjuangan masyarakat Aceh Besar dalam menentang Kolonialisme Belanda (1873-1912)

D. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana Strategi Belanda untuk menguasai Aceh Besar?
2. Bagaimana Perjuangan masyarakat Aceh Besar dalam menentang kolonialisme Belanda (1873-1912)

E. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Strategi Belanda untuk menguasai Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui perjuangan masyarakat Aceh Besar menentang kolonialisme Belanda (1873-1912)

F. MANFAAT PENELITIAN

1. Memberikan informasi bagi peneliti dan masyarakat luas serta bagi mahasiswa jurusan pendidikan sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dalam pemahaman tentang perjuangan masyarakat Aceh Besar dalam menentang Kolonialisme Belanda (1873-1912)
2. Sebagai sumber informasi bagi peneliti dan masyarakat Aceh mengenai perjuangan masyarakat Aceh Besar menentang kolonialisme Belanda.
3. Menambah koleksi buku-buku serta data mengenai perang Aceh bagi peneliti sendiri, maupun lembaga pendidikan lainnya

